

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS (Fokus pada Teknik Kepemimpinan Camat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi)

Elvira Mulya Nalien¹

Abstract

This research aimed to describe the six of leadership techniques of ABTB District Head according to the theory presented by Abdoelrachman in S. Pamuji and its relation in the efforts of people empowerment according to Roesmidi that is information accessibility, involvement, accountability and local organization capacity. The research method used by the writer is qualitative by using descriptive method and inductive approach.

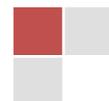
The result of this research shows that the three of leadership techniques, which are: technique of followers preparation/maturation, technique of examples (teladan) and technique of persuasive have been running effectively. The human relation technique that has not been optimized caused by the district head has not fulfilled the need of properness. Ineffectiveness of communication system technique caused by the less communication and coordination between District Head and Section of Economic and People Empowerment. Meanwhile the lack communication between District Head and the working units (SKPD) caused by there is no coordination letter for the order department manuscript. The ineffectiveness of facility supplying technique caused by the unavailability of equipments and proper working place. The internal problems in leadership technique of District Head are Habit and Superego. And external problems are people conventional mindset towards problems of garbages and there still no regulation about waste management in Bukittinggi. The efforts done by District Head is to make stronger communication and coordination with all related parties, making and directing people mindset and also conducting regulation of waste management in Bukittinggi.

Key words: Leadership Techniques, People Empowerment, Program of Community-Based Solid Waste Management

PENDAHULUAN

Melihat hasil perhitungan Bappenas (2003) bahwa pada tahun 1995 bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dan akan meningkat

¹ Penulis adalah staf fungsional umum pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dapat dihubungi melalui email: elviranalien@gmail.com



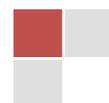
lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Jumlah tersebut semakin menegaskan bahwa permasalahan sampah membutuhkan upaya yang serius dalam penanganannya, tidak terkecuali penanganan oleh *stakeholder* pada tingkat pemerintahan daerah. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang terdepan dalam bidang pariwisata dan perdagangan namun kegiatan di bidang tersebut justru menyebabkan tingginya jumlah timbunan sampah.

Berempati terhadap urgensinya permasalahan sampah, maka Camat, para Lurah dan masing-masing tokoh masyarakat sepakat untuk melaksanakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 3R seperti yang disarankan *UNEP (United Nations Environment Programme)* yaitu *Reduse, Reuse* dan *Recycle*. Upaya tersebut dengan memperhatikan pembangunan bidang persampahan di Indonesia yang mencirikan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Camat merupakan pemimpin dalam pemberdayaan masyarakatnya untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Seperti yang tercantum pada PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pasal 1 ayat (9), bahwa Camat adalah pemimpin dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif, salah satunya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat dimaksudkan bahwa Camat memiliki kewenangan dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di wilayah kerjanya. Dengan teknik kepemimpinan yang dimiliki Camat dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta, melakukan pembinaan dan pengawasan, melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas tersebut kepada Walikota.

Demikian suksesnya program ini, diperkenalkanlah program Bank Sampah dan Tabungan Sampah di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Maksud dari tabungan sampah ini adalah, setiap masyarakat, utamanya siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh mengumpulkan, memilah sampah dan di tabungkan ke Bank Sampah. Timbangannya adalah Rp. 1000/kg sampah sehingga semakin banyak mengumpulkan sampah, semakin banyak pula saldo tabungan yang dimiliki. Sampah menjadi berkurang, lingkungan bersih dan indah dan pendapatan masyarakat pun akan semakin meningkat.

Program ini telah berjalan selama delapan bulan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, namun masih terdapat berbagai kendala, seperti belum adanya alokasi dana dan perlengkapan yang memadai. Tidak hanya itu, sasaran dari program ini adalah masyarakat, namun masih belum memiliki kesadaran untuk terlibat atau berperan serta secara maksimal, hal ini disebabkan paradigma yang berkembang di masyarakat masih konvensional, sampah tetap dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian belum adanya regulasi yang dapat dijadikan payung hukum dan acuan dalam proses penanganan dan pengelolaan sampah terutama mengenai hak



dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi. Serta koordinasi dan komunikasi Camat yang belum efektif terhadap beberapa pihak terkait.

TEORI

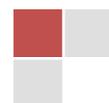
Pengertian Kepemimpinan

Tjahya Supriatna (2010:37) mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan konsep relasi, artinya kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, jika tidak ada pengikut, tidak ada pemimpin. Dalam pengertian ini berarti bahwa pimpinan yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan pengikut. Menurut Thoha (2010:5) bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Robbins (1988:117) bahwa "*Leadership is the ability to influence a group toward the achievement of goals*". Bass dalam Pierce (2006:9) "*Leadership is an interaction between two or more members of a group that often involves a structuring of the situation and the restructuring of the situation and the perception and expectation of the members*". Muhadam Labolo (2012:7) mengistilahkan kepemimpinan ibarat jarum, ia berusaha mencapai tujuan melalui dirinya sendiri (contoh, teladan) sambil membangun benang (masyarakat yang *empowered*).

Teknik Kepemimpinan

Pamudji (1985:65) mengatakan bahwa teknik kepemimpinan adalah suatu cara yang merupakan pola tetap untuk mempengaruhi orang-orang agar bergerak ke arah yang di inginkan pemimpin. Disamping itu menurut Arifin Abdoelrachman dalam Pamudji menjelaskan bahwa teknik kepemimpinan meliputi:

1. Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut
Yaitu menyiapkan para pengikut agar selalu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemimpin melalui teknik penerangan. Dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang sehingga mereka mendapatkan pengertian yang jelas dan mendalam mengenai sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin sesuai dengan rasa hati dan akalunya.
2. Teknik *Human Relation*
Merupakan proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang, yaitu keseluruhan proses pemberian motif (dorongan) agar orang mau bergerak. Yang dapat dijadikan motif yaitu pemenuhan kebutuhan yang meliputi kebutuhan manusia, seperti kebutuhan akan kelayakan kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan untuk diikutsertakan.
3. Teknik Menjadi Teladan



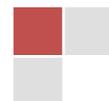
- Teknik ini dengan memberikan contoh-contoh, orang-orang yang harus digerakkan itu lalu mengikuti apa yang dilihat.
4. Teknik Persuasif dan Pemberian Perintah
Teknik persuasif dilakukan dengan ajakan-ajakan yang lunak sehingga orang-orang yang diajak itu bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan sendiri. Teknik pemberian perintah, yaitu menyuruh orang yang diberi perintah untuk mematuhi perintah melakukan sesuatu.
 5. Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi Yang Cocok
Komunikasi berarti menyampaikan suatu maksud kepada pihak lain, dalam rangka penerangan, persuasi, perintah dan sebagainya. Yang penting adalah maksud itu diterima oleh si penerima sama dengan maksud si pengirim.
 6. Teknik Penyediaan Fasilitas-fasilitas
Jika sekelompok orang siap untuk mengikuti ajakan si pemimpin, maka orang-orang tersebut harus diberi fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Beberapa fasilitas atau kemudahan tersebut meliputi kecakapan; dapat diberikan melalui pendidikan dan pelatihan, uang; biasanya dikerjakan dalam anggaran belanja, perlengkapan dan tempat kerja, waktu, mutlak diperlukan untuk melakukan sesuatu dan perangsang adalah sesuatu yang menarik.

Kecamatan (UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan)

Regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan “Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota” dan pada ayat 9 “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (3) dan PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 15 ayat (1), pada huruf a yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, berkenaan dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh, Camat tampil sebagai pemimpin dalam pemberdayaan masyarakat melalui program tersebut dengan diperkuat kewenangan atributif yang dimilikinya dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Adapun Camat juga harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dipertegas bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang berwenang dalam



merumuskan kebijakan mengenai sampah Kota Bukittinggi secara umum, Camat menggunakan teknik kepemimpinan dalam memberdayakan masyarakatnya melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dan masyarakat melaksanakan program tersebut di Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

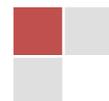
Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan dalam pengertian yang dinamis mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menurut Roesmidi (2002) dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, secara bertanggungjawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

b. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat

Watson seperti yang dikutip dalam Roesmidi menyebutkan kendala-kendala dalam upaya pemberdayaan sebagai berikut:

1. Kendala yang berasal dari kepribadian individu:

- a) Kestabilan (*Home Ostatic*)
Merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan dorongan-dorongan dari luar (*stabilking forces*).
- b) Kebiasaan (*Habit*)
Setiap individu akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya, kebiasaan adalah suatu tindakan yang sebaiknya dilakukan. Walaupun kebiasaan ini oleh pihak lain dinilai tidak baik.
- c) Hal yang Utama (*Pvimag*)
Adalah sikap yang sudah terbentuk dalam menghadapi objek sikap yang dijumpai, dimana setiap tindakan akan disesuaikan dengan yang sudah *primacy* adalah hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan.
- d) Seleksi Ingatan dan Persepsi (*Selective Perception and Retention*)
terbentuk tadi.
- e) Ketergantungan (*Dependence*)
Ketergantungan terhadap orang lain dalam menghambat proses “pemandirian” masyarakat.
- f) *Superego*
Superego yang terlalu kuat membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan dan menganggap pembaharuan merupakan hal yang tabu.
- g) Rasa Tidak Percaya Diri (*Self Distrust*)
Konsekuensi dari ketergantungan dan superego masa kanak-kanak yang berlebihan. Bila berlanjut dapat mempengaruhi keterampilan dan kinerja.
- h) Rasa Tidak Aman dan Regresi (*Insecurity and Regression*)



Rasa tidak senang/nyaman dengan keadaan saat ini perubahan dirasakan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan.

c. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat seperti yang di jelaskan Roesmidi perlu memperhatikan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

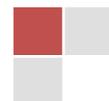
1. Aksesibilitas Informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan: peluang, layanan, penegakkan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas.
2. Keterlibatan atau Partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.
3. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawabannya publik atas segala kegiatannya yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.
4. Kapasitas Organisasi Lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

d. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

Defenisi pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang didominasi oleh masyarakat, dengan swadaya dana dan perlengkapan peralatan uang didominasi oleh masyarakat dengan dikoordinasikan dan dipimpin oleh *stakeholder* yang terkait dapat disebut Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Camat menjadi pemimpin dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, tentang Hak dan Kewajiban, pada BAB IV pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat juga berhak memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Untuk hal kewajiban, dinyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Community Based Solid Waste Management / CBSWM atau yang dikenal dengan pengolahan sampah secara terpadu berbasis masyarakat/komunitas dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi yang dekat dengan sumber sampah yaitu di Tempat Penampungan Sampah (TPS). Alternatif ini sangat tepat karena pengolahan maupun pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi belum optimal. Hal ini terkendala oleh kemampuan sarana dan prasarana yang tidak mampu mengimbangi jumlah volume sampah yang dihasilkan. Program ini dilakukan melalui pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)



e. Bank Sampah Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai Pelaksanaan 3R(*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui Bank Sampah

Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian Pasal 2 Ayat 2, menguraikan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah tersebut dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 huruf e meliputi: pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah dan memperbanyak bank sampah. Bank sampah merupakan wujud pelaksanaan pengelolaan sampah karena mencakup kegiatan 3R. Seperti Bank pada umumnya, maka Bank Sampah memiliki Tabungan Sampah untuk menerima sampah dari penabung sepanjang memiliki nilai ekonomi.

METODE

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Ruang lingkup sebagai bidang ilmu yang dibahas yaitu teknik kepemimpinan dan pemberdayaan. Adapun dalam penelitian ini *person*-nya terdiri dari Camat, pegawai kecamatan dan masyarakat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Penelitian diselenggarakan di Kantor Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi dan penulis mendapatkan data-data yang diperlukan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh serta di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi.

Sumber data primer melalui proses wawancara. Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh serta pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi (pengamatan) dan studi kepustakaan, dengan instrumen berupa Pedoman Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

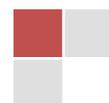
PEMBAHASAN

a. Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut

1) Memberikan Keterangan yang Jelas dan faktual

Berdasarkan hasil observasi penulis, Camat ABTB menggunakan teknik penerangan dengan menitikberatkan untuk memberi keterangan yang jelas dan faktual kepada masyarakat. Selain itu, dengan kemampuan Camat memberikan keterangan yang jelas dan faktual, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh sehingga menyebabkan timbulnya kemauan dan tindakan mengikuti apa yang disampaikan pemimpin dengan rasa hati dan akal tanpa rasa terpaksa karena dilandasi rasa takut

Berdasarkan hasil wawancara informan, yaitu dengan Ibu Zulfanita, Sekretaris Lurah Aur Kuning yang menyatakan bahwa Camat mampu memberikan



keterangan mengenai esensi dan substansi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Ketua Dasawisma Linggarjati, Ibu Theresia yang diwawancarai penulis juga membeberkan kepiawaian Camat dalam menyampaikan program tersebut melalui keterangan yang jelas dan faktual sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Tidak hanya itu, berdasarkan informasi dari beberapa narasumber, Camat ABTB selalu berupaya memperhatikan *audience*-nya, baik terhadap pegawai, masyarakat dan anak-anak SD. Keterangan yang diberikan kepada pegawai maupun masyarakat dewasa tidak dapat disamakan anak-anak Sekolah Dasar yang lebih mudah mencerna keterangan Camat jika disampaikan bahasa dan kata-kata yang ringan sehingga mudah dimengerti dan menimbulkan keinginan untuk berbuat seperti apa yang diarahkan oleh Camat ABTB.

2) Mengetahui Pengetahuan, Pendidikan, Adat Istiadat dan *Mind Set* Masyarakat.

Penulis memperhatikan, bahwa pendidikan masyarakat mengenai lingkungan dan sampah begitu rendah sehingga pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, sampah dan pengelolaannya sangat minim. Kemudian telah menjadi kebiasaan masyarakat kota Bukittinggi untuk membuang sampah tanpa harus dipilah kembali. Sehingga, ketika diperkenalkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, masyarakat belum *welcome* bahkan terkesan tidak menghiraukan. Hal ini menjadi tantangan Camat ABTB untuk mampu memberikan dan meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan di Kecamatan ABTB. Selanjutnya juga mampu membentuk kebiasaan masyarakat Kecamatan ABTB agar cerdas dan tanggap dalam menangani sampah.

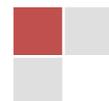
Sekretaris Camat ABTB, Bapak Masriwal, S.Sos mengungkapkan, Kota Bukittinggi sebagai kota yang terdepan di bidang pariwisata dan perdagangan menyebabkan masyarakat kota Bukittinggi memiliki jati diri yang begitu tinggi sehingga telah tertanam suatu *mind set* bahwa sampah maupun pengelolaannya adalah pekerjaan yang rendah dan hanya membuang-buang waktu. Berhubung *mind set*, Camat untuk mengutamakan siswa Sekolah Dasar di Kecamatan ABTB dalam program Bank dan Tabungan sampah adalah agar membentuk dan menumbuhkembangkan *mind set* siswa-siswa tersebut agar sejak dini bijak terhadap sampah dan lingkungannya. Diharapkan dapat timbul kesadaran bahkan rasa bersalah jika membuang sampah sembarangan.

b. Tindakan

1) Aksesibilitas Informasi

Berdasarkan hasil penelitian maka Camat dapat mengambil tindakan berupa aksesibilitas informasi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Camat mengakses informasi dengan pihak Sophie Steven dari Pekan Baru yang merupakan pusat perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup pada bagian Pengelolaan *Ecoregion* untuk bagian Pulau Sumatera



dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi perwakilan kelurahan.

2. Camat ada mengundang Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi mengenai sampah dan lingkungan kepada masyarakat, terutama siswa SD Kecamatan ABTB.
3. Camat menerima pihak Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta mengadakan penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan ABTB dan studi banding ke Universitas tersebut mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga didapat disosialisasikan kepada masyarakat.
4. Camat menginformasikan barang daur ulang sampah kepada Anggota DPRD dengan tujuan agar dapat dibahas dalam rapat DPRD berkenaan dengan bantuan dana untuk biaya Bank Sampah Azzam Kreatif.

2) Keterlibatan atau Partisipasi

Pada Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, masyarakat merupakan partisipan utama untuk melaksanakan dan menyukseskan program tersebut. Dari elemen masyarakat dilibatkan pula Kelompok PKK, Kelompok Bundo Kandung, Kelompok Dasawisma, Kelompok Tani dan Organisasi Pemuda. Selain masyarakat, untuk hal yang berkenaan dengan teknis dan operasional, maka turut melibatkan SKPD terkait, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan dan Nagari serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

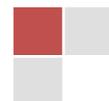
Sejauh ini Camat belum melibatkan pihak swasta yang dapat membantu Bank Sampah Azzam Kreatif dalam memenuhi kebutuhan akan peralatan, perlengkapan maupun dana yang belum memadai. Akan tetapi, Camat melibatkan beberapa warga masyarakat yang bersedia menjadi donatur untuk membantu mengatasi kekurangan sarana dan prasarana Bank Sampah Azzam Kreatif.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Berdasarkan amanat pada pasal 16 huruf (e) PP Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yang berbunyi “Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat”

4) Kapasitas Organisasi Lokal

Esensi dari kapasitas organisasi lokal menurut Roesmidi adalah pemimpin harus memiliki kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga masyarakat serta memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* dirumuskan empat faktor penunjang yang belum terpenuhi secara maksimal. Maka Camat ABTB sebagai pembina dan penasehat, berupaya membantu mencarikan solusi alternatif untuk memenuhi empat faktor tersebut. Camat pun berusaha mengorganisir warga masyarakat serta memobilisasi sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah yang



mereka hadapi. Dana; Camat ABTB mengarahkan Direktur Bank Sampah untuk mengajukan proposal permohonan dana untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB ke Pemerintah Kota. Sumber Daya Manusia; Camat meminta masing-masing kelurahan mengirimkan dua orang perwakilan untuk mengikuti diklat mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Peralatan dan Perlengkapan; Camat mencari akses dan informasi untuk merangkul para donatur yang dapat membantu dalam hal dana maupun peralatan dan perlengkapan. Pemasaran; Dipasarkan ke berbagai SKPD, berbagai elemen masyarakat bahkan SKPD luar kota Bukittinggi

5) Sosialisasi

Camat mensosialisasikan program ini melalui:

1. Apel pegawai kecamatan dan kelurahan
2. Apel biasa kecamatan setiap hari Rabu
3. Rapat Evaluasi
4. Pertemuan Dasa Wisma, PKK, Bundo Kandung, Kelompok Tani.
5. Sosialisasi kepada siswa-siswi sekolah terutama sekolah
6. Event-event tertentu yang dilaksanakan di Kecamatan ABTB

6) Pengawasan

Demi kesempurnaan hasil dari kegiatan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, Camat ABTB melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan serta terhadap laporan keuangan Bank Sampah Azzam Kreatif, untuk mengetahui perkembangan produksi dan pendapatan setiap bulannya.

b. Teknik Human Relation

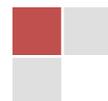
1) Motivasi

Dalam rangka memotivasi pegawai kecamatan dan kelurahan, Camat melakukan berbagai upaya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Camat akan mengumumkan pegawai kecamatan yang memiliki tabungan sampah tertinggi dan yang terendah. Kedua, Di Kantor Kecamatan ABTB terdapat papan pengumuman yang dapat ditemukan di lobi untuk menunjukkan pegawai kecamatan dan kelurahan dengan ranking tertinggi dan terendah dalam mengumpulkan sampah. Kemudian untuk meningkatkan motivasi bagi siswa Sekolah Dasar, Camat dalam sosialisasinya memberitahukan bahwa dengan membawa sampah rumah tangga ke sekolah, akan dihargai satu kilogramnya dengan Rp. 1000.

Berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat, Camat selalu memberikan tantangan agar semakin giat dan terus berupaya untuk menemukan inovasi baru dalam mendaur ulang sampah. Seperti yang dikatakan Ibu Theresia, Ketua Dasawisma Linggarjati yang saat wawancara mengatakan bahwa Camat ABTB selalu memberikan tantangan kepada beliau untuk menghasilkan berbagai bentuk barang daur ulang sampah yang baru, kreatif dan inovatif.

2) Mengetahui Kebutuhan Bawahan dan Masyarakat



Berkenaan dengan upaya meningkatkan motivasi, Karyadi menguraikan tentang kebutuhan psikologis sebagai berikut:

a) Kebutuhan akan Kelayakan

Dalam rangka upaya Camat ABTB dalam memenuhi kebutuhan akan kelayakan masyarakatnya, Camat tidak memaksakan program ini dengan berbagai intervensi dan sanksi. Namun disisi lain Camat ABTB belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan kelayakan pegawai kecamatannya karena Camat masih belum melibatkan, memperhatikan buah pikiran, kritik dan saran yang diberikan bawahannya.

b) Kebutuhan akan Penghargaan

Pegawai kecamatan, kelurahan, kelompok masyarakat dan guru serta siswa sekolah dasar akan semakin giat mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas jika usaha mereka dihargai, dengan kata ucapan terima kasih serta *reward*.

c) Kebutuhan akan Keamanan dan Ketentraman

Dengan keadaan yang mendukung atas situasi yang aman dan tentram akan mendorong Bank Sampah Azzam Kreatif semakin terpacu menghasilkan kompos dan barang-barang daur ulang sampah dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik.

d) Kebutuhan untuk Menjadi Anggota

Camat melibatkan banyak unsur yang terkait. Yaitu Kelompok Dasa Wisma, PKK, Bundo Kandung, Dharma Wanita, Kelompok Tani dan sebagainya. Kelompok masyarakat ini tetap konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan program ini.

Keempat kebutuhan tersebut harus diperhatikan oleh Camat. Memperhatikan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow “Kebutuhan didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri”. Apabila kebutuhan bawahan maupun masyarakat terpenuhi maka mereka akan melaksanakan program tersebut dengan baik sebagai manifestasi rasa puasnya.

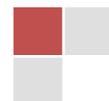
c. Teknik Menjadi Teladan

1) Sikap dan Perilaku Teladan

Camat ABTB menampilkan keteladanan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perkataan merupakan nilai moral yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tumbuhnya kepercayaan dalam diri setiap anggota terhadap pemimpinnya disebabkan oleh sifat keteladanannya.

2) Pemberian Contoh

Camat mengawali pemberian contoh dengan membawa sampah dari rumah, setibanya di kecamatan beliau membuang sampahnya menurut klasifikasi yaitu sampah plastik dan sampah kertas kemudian diproduksi Bank Sampah Azzam kreatif. Di rumah, Camat ABTB juga membuat dan mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos. Hal tersebut sebagai salah satu upaya Camat dalam upaya menghimbau masyarakat Kecamatan ABTB untuk mau membuat kompos, mengolah dan menggunakan barang-barang daur ulang sampah. Ibu Memen, yang penulis wawancarai ketika dilaksanakan acara kader posyandu di Kecamatan ABTB



menyatakan bahwa Camat ABTB tidak segan menggunakan tas hasil daur ulang sampah ke berbagai pertemuan penting beliau. Selain itu, di ruangan kerja Camat dapat penulis temui berbagai barang daur ulang sampah seperti alas meja, tempat tisu, tempat map dan juga dipajang tas hasil daur ulang sampah.

d. Teknik Persuasif/ Pemberian Perintah

1) Mengajak Secara Persuasif

Camat ABTB berdasarkan hasil observasi penulis, menggunakan teknik persuasif melalui ajakan-ajakan lunak sehingga orang-orang yang diajak itu bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan sendiri. Camat ABTB tidak menginstruksikan dengan memberikan perintah yang dibarengi sanksi dan denda. Camat melakukan pendekatan dengan cara *sharing* dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi berulang-ulang, sehingga timbul pemahaman dan kemauan masyarakat.

2) Pemberian Reward

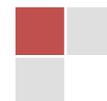
Camat menggiatkan motivasi pegawai kecamatan dengan cara mengumumkan nama pegawai yang memiliki jumlah tabungan sampah terbanyak dan tersedikit saat apel pegawai kecamatan. Kelurahan yang menyetorkan sampah terbanyak ke Kantor Kecamatan, akan di beri pula *reward* berupa hasil daur ulang sampah. *Reward* kepada siswa-siswi Sekolah Dasar di Kecamatan ABTB adalah dengan menghargai tabungan sampah rumah tangga yang mereka bawa setiap satu kilogramnya senilai Rp. 1000,00.

e. Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi yang Cocok

1) Komunikasi Vertikal dan Horizontal

Adapun komunikasi Camat ABTB dalam program Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas terbagi dua. Pertama Camat melakukan komunikasi dengan baik terhadap atasan sebagai bentuk komunikasi vertikal. Yaitu kepada Walikota Bukittinggi dalam bentuk melaporkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Hal ini mengacu pasal 16 huruf e PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu “Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat”. Setelah melaporkan kepada Walikota, kemudian tembusan kepada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan dan Nagari Kota Bukittinggi.

Akan tetapi komunikasi vertikal ke bawah antara Camat dengan bawahannya belum berlangsung baik dan efektif karena Camat hanya sekedar memberitahukan bahwa ada Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas kepada seksi terkait yaitu, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi. Kemudian tidak ada arahan lebih lanjut dari Camat mengenai ini kepada seksi tersebut dan bahkan tidak mengikutsertakan seksi tersebut ke lapangan untuk bertemu masyarakat. Camat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas seharusnya melibatkan berbagai SKPD di Kota Bukittinggi. Misalnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam rangka memperluas akses dan jaringan pangsa



pasar untuk mempromosikan berbagai barang daur ulang sampah. Dinas Pertanian, dalam hal menggiatkan pupuk kompos dari hasil olahan sampah organik. Penting berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan demi terjaminnya kebersihan dan kesehatan dari hasil barang sampah.

Hasil temuan yang diperoleh penulis berkenaan dengan teknik ini adalah komunikasi kepada berbagai SKPD yang telah dilibatkan hanya secara lisan. Seperti yang diceritakan oleh Pak Mardison selaku Ketua Kantor Lingkungan Hidup saat dilakukannya wawancara pada hari Senin, tanggal, 22 Mei 2013 di ruangan DKP Bukittinggi. Beliau berpendapat bahwa memang lebih cepat proses komunikasi dengan SKPD terkait melalui lisan, karena langsung kepada orang yang dituju, namun alangkah lebih baik jika tetap mengirimkan surat secara resmi. Komunikasi Camat terhadap masyarakat dilakukan secara langsung *face to face*, via telepon maupun sms. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara Camat dengan Walikota serta kepada masyarakat sebagai komunikasi vertikal ke atas telah berlangsung dengan efektif. Namun tidak demikian halnya komunikasi dengan bawahannya yang merupakan komunikasi vertikal ke bawah maupun komunikasi horizontal dengan berbagai SKPD terkait.

2) Bahasa dalam Berkomunikasi

Camat ABTB memiliki latar belakang pendidikan di perguruan tinggi kedinasan yang berorientasi pada ilmu pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kata-kata dalam bahasa yang disampaikan Camat telah terstruktur namun fleksibel dan tidak kaku. Sehingga pesan yang tersirat dalam proses Camat berkomunikasi dapat ditangkap dan dipahami oleh pegawai dan masyarakatnya.

3) Alat komunikasi

Selain komunikasi *face to face*, apabila Camat ABTB berhalangan hadir, tetap menjaga komunikasinya dengan *handphone*, baik via telepon maupun sms. Komunikasi audial dapat disiarkan melalui radio, seperti RRI dan Bukittinggi FM. Camat juga dapat melakukan komunikasi dalam memberikan informasi mengenai Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui komunikasi audio-visual melalui surat kabar dan buletin lokal Bukittinggi maupun tingkat Sumatera Barat. Selanjutnya komunikasi audio-visual, Camat memberikan informasi dan uraian kegiatan program tersebut melalui website Bukittinggi, maupun yang diliput pada televisi lokal yaitu Bi-TV dan Tria Arga.

4) Proses Komunikasi

Teknik penggunaan sistem komunikasi yang tepat, antara pemimpin dengan masyarakat dapat menjawab 5W, yang dikemukakan Soehardjono (1981) yaitu:

1. *Who*, siapa yang mengirim berita?

Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan atau yang memulai untuk berkomunikasi. Pengirim berita adalah Camat ABTB

2. *What*, berita apa yang disampaikan?



Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

3. *Which*, saluran komunikasi mana yang digunakan?

Wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik). Komunikasi secara langsung berupa komunikasi *face to face* dan komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi audial, visual dan audio-visual.

4. *Whom*, kepada siapa berita itu disampaikan?

Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, berbagai elemen masyarakat.

5. *What effect*, apa tujuannya?

Tujuan dari Program Pengelolaan Sampah Berbasis adalah turut serta dalam mengurangi beban sampah pemerintah Kota Bukittinggi yang merupakan masalah yang krusial, menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bebas sampah sesuai amanat pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan pendapatannya.

f. Teknik Penyediaan Fasilitas

a) Kecakapan Pemimpin

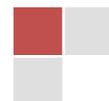
Camat dituntut memiliki konsep dan pengetahuan mengenai program yang ramah lingkungan tersebut. Kecakapan konsepsional diupayakan Camat ABTB diantaranya dengan melaksanakan Studi Banding ke Universitas Sanatha Dharma dimulai pada tanggal 13 hingga 18 Februari 2013 di Yogyakarta. Kemudian Camat menyampaikan dan mengerahkan masyarakat Kecamatan ABTB untuk dapat mendukung dan menyukseskan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Sehingga Camat juga memiliki kecakapan kemanusiaan (*Human Skill*). Berikutnya kecakapan Teknis (*Technicall Skill*). Camat ABTB berkewajiban tahu dan mampu melakukan mekanisme dalam proses Program ini meskipun hal teknis dan operasional Bank dan Tabungan Sampah di serahkan kepada Bank Sampah Azzam Kreatif.

b) Dana

Awalnya dana berasal dari swadaya masyarakat. Namun Camat terus mengupayakan komunikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Berdasarkan arahan Camat, Bank Sampah Azzam Kreatif mengajukan proposal ke Pemko Bukittinggi dan disetujui pencairan dana sebesar Rp. 40.000.000 bulan Mei 2013. Perhitungan sementara sebesar Rp. 30.000.000 dialokasikan untuk mencairkan tabungan seluruh Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan ABTB, sisanya untuk biaya produksi, pemasaran dan upah pekerja.

c) Perlengkapan dan Tempat Kerja

Perlengkapan sebelumnya milik pribadi Pak Enjang, kemudian Camat mencari akses donatur untuk dapat membantu dalam penyediaan perlengkapan dan peralatan. Salah satunya Bapak Gusrizal Kari Muhammad yang menyumbangkan mesin jahit pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 kepada Bank Sampah Azzam Kreatif. Sementara itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberikan bantuan betor



berupa becak mesin, untuk membawa sampah dari seluruh SD se-kecamatan ABTB ke Gudang Bank Sampah untuk diolah.

Tempat kerja berlokasi di rumah Pak Enjang yang juga merupakan tempat produksi daur ulang sampah. Namun tempat penyimpanan sampah dialokasikan sebagian besar ke salah satu ruangan Kantor Kecamatan ABTB karena kapasitas posko Bank Sampah Azzam Kreatif *overload* untuk menampung sampah sementara. Belum ditemukannya tempat yang representative. Dialokasikannya sebagian sampah di ruangan kantor Kecamatan bagian belakang sebenarnya telah mengganggu estetika dan tata ruang yang sebelumnya telah baik. Sehingga sampah harus segera dialokasikan ke tempat lain, karena ruangan tersebut adalah inventaris pemerintah, yang jika digunakan, harus mengikuti prosedur “pinjam-pakai “dalam rangka pemanfaatan barang milik pemerintah daerah.

d) Waktu

Menurut Ibu Muzinar, Kepala Sekolah SDN 07 Belakang Balok, Camat ABTB selalu rutin memantau pelaksanaan tabungan sampah siswa dalam rangka mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas. Camat ABTB bahkan meluangkan waktunya pada hari Sabtu dan Minggu hanya untuk memantau perkembangan motivasi, semangat serta peningkatan saldo tabungan sampah siswa. Bahkan jika Camat ABTB berhalangan hadir ke sekolah, tetap memberikan waktunya memantau secara tidak langsung melalui telepon. Sedangkan waktu yang diluangkan Camat kepada Bank Sampah Azzam Kreatif sangat utuh, sesuai yang disampaikan Bapak Enjang selaku Direktur Bank Sampah bahwa Camat selalu datang pagi setiap hari untuk melihat peningkatan kinerja Bank Sampah Azzam Kreatif.

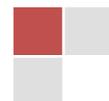
e) Perangsang

Pemberian *reward* berupa barang daur olahan sampah merupakan hal yang menarik dan diinginkan oleh pegawai. Prosedur untuk mendapatkan *reward* tersebut transparan karena bendahara tabungan sampah mengakumulatikan jumlah saldo tabungan sampah masing-masing pegawai. Demi meningkatkan keingintahuan dan motivasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, maka pada setiap kesempatan sosialisasi, Camat membawa kompos serta hasil barang daur ulang sampah dengan berbagai bentuk yang menarik. Camat juga memutar video atau presentasi mengenai program, pelaksanaan dan kesuksesan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di berbagai provinsi, contohnya di Kota Surabaya, Jawa Timur maupun di negara lain seperti Malaysia dengan program Petrajaya dalam mengatasi persoalan sampah

Kendala Teknik Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

a. Kendala Internal

1) Kebiasaan/Habit



Mengkomunikasikan dan mengoordinasikan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas terhadap masyarakat telah efektif, yaitu penginterasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan program ini dengan memberikan informasi dan berkomunikasi secara lisan dan turun langsung ke lapangan. Namun tidak demikian dengan berbagai SKPD terkait. Camat melakukan koordinasi namun tidak dibarengi dengan surat resmi yang menjadi syarat tertib administrasi di lingkungan pemerintahan dan tata naskah dinas yang berlaku.

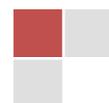
Komunikasi yang belum efektif terhadap bawahan di kecamatan ABTB, yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi. Ibu Sefa Yusrita selaku Kepala Seksi (Kasi) mengungkapkan saat diwawancarai bahwa Camat tidak mengarahkan lebih lanjut kepada seksi tersebut, hanya sebatas menginformasikan bahwa ada program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Padahal pada Renstra Kecamatan ABTB Tahun 2010-2014 mengenai tugas pokok dan fungsi pegawai Kecamatan ABTB, jelas merupakan tupoksi dari seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi.

Dibagian sekretariat, Kasubag Umum, Ibu Nelmiza, kecamatan ABTB saat diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada surat keluar kepada berbagai SKPD terkait koordinasi mengenai program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Pegawai tersebut tidak membuat surat karena Camat tidak memberitahukan bahwa ada acara sosialisasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan maupun Kantor Lingkungan Hidup. Dirangkum kesimpulan Camat hanya membangun komunikasi efektif kepada masyarakat saja. Padahal komunikasi seharusnya dimulai dari lingkungan pegawai Kecamatan ABTB. komunikasi dan koordinasi antara Camat dengan SKPD terkait juga belum berlangsung maksimal karena hanya berkomunikasi ataupun berkoordinasi secara lisan saja.

2) *Superego*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa Camat masih memiliki ego tersendiri untuk menjalankan program ini. Camat selalu dengan Direktur Bank Sampah dan Lurah Aur Kuning saja. belum melibatkan pegawai kecamatan seperti yang telah diungkapkan pada kendala kebiasaan/ *habit* diatas serta belum mau berkenan mengikutsertakan beberapa SKPD yang dapat mendukung suksesnya Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB tersebut. Sejauh ini Camat masih melibatkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk memberikan sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas.

Melibatkan pegawai berkaitan dengan pendelegasian wewenang. Ketika Camat berhalangan hadir karena kesibukan kerja atau dinas luar, maka harus ada pegawai Kecamatan ABTB yang mewakili. Sehingga Camat mesti mendelegasikan wewenangnya kepada pegawainya, yang lebih tepat disini adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis, Camat belum mengikutsertakan seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi. Padahal berdasarkan Renstra Kecamatan ABTB Tahun 2012-2014, bahwa



beberapa tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi adalah menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan bersifat pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kecamatan dan menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

b. Kendala Eksternal

1) *Mind Set* Masyarakat

Mind set masyarakat tergolong konvensional dengan berfikir bahwa “tidak pentingnya sampah” dan istilah *not in my backyard*” (asal tidak di pekarangan saya) telah mengakar kuat. Masyarakat merasa tidak memiliki kewajiban apa-apa lagi ketika sampah rumah tangga maupun sampah industrinya telah dibuang baik ke TPS. *Mind set* dan mental masyarakat Kecamatan ABTB seperti ini harus diputus mata rantainya agar cara berfikir dan sikapnya tidak diturunkan oleh generasi muda selanjutnya.

2) Peraturan Daerah Bukittinggi Mengenai Pengelolaan Sampah

Selama penulis melakukan penelitian dan observasi, regulasi yang berkaitan dengan sampah hanyalah Peraturan Daerah mengenai Retribusi Sampah di kota Bukittinggi.

Upaya Mengatasi Kendala Teknik Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

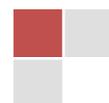
a. Upaya Mengatasi Kendala Internal

1) Penguatan Komunikasi dan Koordinasi Sebagai Upaya untuk Mengatasi Kendala Kebiasaan/*Habit* dan *Superego*

Camat terlebih dahulu mengefektifkan komunikasi dengan para pegawai kecamatan ABTB sendiri. Menginstruksikan bagian sekretariat untuk selalu membuat surat koordinasi kepada pihak terkait dan membuat notulen setiap rapat tentang program ini. Camat perlu menginstruksikan Kasi Humas membuat klipring yang berisi berita-berita di koran dan majalah Sumatera Barat mengenai program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Hal terpenting adalah Camat perlu memaksimalkan peran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi dengan menampung buah pikiran, kritik dan sarannya, juga dimaksudkan agar adanya pendelegasian wewenang ketika Camat ketika berhalangan hadir disaat kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan ABTB.

2) Penguatan Koordinasi dengan SKPD Terkait

Camat dalam menjalankan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas ini belum melibatkan beberapa SKPD yang dapat membantu dan menyukseskan program ini. Berdasarkan penjelasan Silalahi (2009:5), “Perlunya diintegrasikan berbagai SKPD terkait”, dalam hal ini pada gerakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di Kecamatan ABTB. Camat melakukan komunikasi dan koordinasi tidak saja dengan komunikasi dan koordinasi lisan, juga non lisan seperti



mengirimkan surat koordinasi dari Kecamatan ABTB untuk tertib administrasi, mematuhi tata naskah dinas dan menjunjung tinggi etika pemerintahan.

b. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

1) Penguatan Apresiasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Perlu dilakukan penguatan apresiasi masyarakat melalui kegiatan seminar, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Camat dapat mengundang orang-orang yang telah berhasil mengelola sampah sebagai narasumber sehingga pengalaman nyata dapat diterima dan memotivasi masyarakat. Dapat pula dilakukan pemutaran film mengenai mengenai proses dan hasil dari kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dengan menggunakan metode 3R.

2) Mengembangkan Motivasi terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Motivasi dapat tumbuh dan ditingkatkan dengan pemberian *reward* kepada pegawai serta kelurahan yang memiliki tabungan sampah terbanyak serta penghargaan siswa-siswi SD berupa Rp. 1000,00 untuk tiap 1 kg sampah. Kecamatan dapat bekerja sama dengan Bank Sampah Azzam Kreatif membuat selebaran, spanduk dan kata-kata motivasi yang berkenaan dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas di sekitaran wilayah Kecamatan ABTB.

3) Penguatan Komunikasi Pemerintah Kecamatan dengan Masyarakat

Perlu dilakukan musyawarah bersama antara Camat, Direktur Bank Sampah Azzam Kreatif, para lurah dan masyarakat. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, prosesnya, hasilnya serta juga untuk mengklarifikasikan apa-apa saja yang dibutuhkan. Musyawarah ini akan lebih akrab jika melaksanakan musyawarah di salah satu rumah masyarakat, bukan di aula kecamatan ABTB.

4) Penguatan Kader dan Regenerasi Pemuda Peduli Sampah

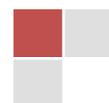
Kaderisasi ini dengan maksud untuk melahirkan pemuda-pemudi yang memiliki kepedulian dan integritas terhadap lingkungannya. Tidak hanya diharapkan peduli saja, akan tetapi juga mampu berbuat gebrakan yang lebih baik dan maju mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan yang mampu memberdayakan masyarakatnya secara optimal.

5) Pengembangan/Revitalisasi Kerjabakti dalam Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini dapat diinstruksikan secara persuasif oleh Camat yang disampaikan ke berbagai kelurahan sehingga para Lurah menyebarkan sekaligus mengajak masyarakat untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan memilah sampah yang layak pakai kemudian membuang sampah yang sudah tidak layak pakai ke TPS Kecamatan ABTB, seperti melaksanakan “JumSi” (Jum’at Bersih).

6) Pendidikan Pengelolaan Sampah sejak Usia Dini

Membentuk *mind set* yang baik dalam pengelolaan sampah memang sebaiknya dimulai dari usia dini. Camat telah mengajarkan dan menanamkan *mind set* yang baik



mengenai Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui kegiatan pengumpulan, pemilahan dan daur ulang sampah kepada siswa-siswi Sekolah Dasar di Kecamatan ABTB. Jika diterapkan secara konsisten, sehingga siswa-siswi yang masih anak-anak dalam usia dini tersebut akan tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya peduli lingkungan namun juga mampu membuat gebrakan pengelolaan sampah yang baik.

7) Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi

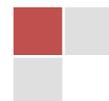
Penanganan sampah akan lebih intensif dilaksanakan oleh masyarakat jika ada regulasi yang memberikan acuan serta yang dapat mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah baik untuk sampah umum maupun sampah jenis rumah tangga. Yaitu berupa peraturan daerah ataupun peraturan Walikota Bukittinggi tentang Pengelolaan Sampah. Itulah sebab pengelolaan sampah di Kecamatan ABTB ataupun untuk Kota Bukittinggi belum berjalan efektif.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, hasil penelitian, observasi serta pembahasan mengenai Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Fokus pada Teknik Kepemimpinan Camat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi), maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teknik Kepemimpinan Camat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas belum terlaksana dengan optimal karena hanya tiga teknik yang berlangsung secara efektif yaitu Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut, Teknik Menjadi Teladan dan Teknik Persuasif. Sedangkan tiga teknik kepemimpinan yaitu Teknik *Human Relation*, Teknik Sistem Komunikasi dan Teknik Penyediaan Fasilitas belum berjalan seperti yang diharapkan.

Kendala internal teknik kepemimpinan camat dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas adalah Kebiasaan (*Habit*) dan *Superego*. Kendala eksternalnya adalah *Mind Set* masyarakat yang konvensional terhadap sampah dan pengelolaannya. Serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi. Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala teknik kepemimpinan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, terdiri dari upaya dalam mengatasi kendala internal berupa penguatan koordinasi dan komunikasi Camat dengan pegawai Kecamatan ABTB maupun dengan berbagai SKPD yang terkait. Selanjutnya upaya untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan mengarahkan *mind set* masyarakat mengenai Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dengan upaya sebagai berikut:

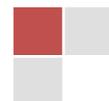
- a. Penguatan apresiasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas melalui seminar, penyuluhan dan sosialisasi.
- b. Mengembangkan motivasi terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan memberikan *reward*.



- c. Penguatan komunikasi pemerintah Kecamatan dengan Masyarakat melalui musyawarah terbuka di rumah warga.
- d. Pengembangan atau revitalisasi kerjabakti dalam Pengelolaan Sampah melalui Jum'at Bersih tiap minggunya.
- e. Penguatan kader dan regenerasi Pemuda Peduli Sampah.
- f. Pendidikan Pengelolaan Sampah sejak Usia Dini (TK dan SD)
- g. Kemudian Pemerintah Kota bersama dengan DPRD segera melakukan penyusunan dan penerbitan regulasi berupa Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Bukittinggi serta segera merealisasikannya.

Berkenaan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah terangkum dalam kesimpulan, maka penulis mengajukan proposal saran sebagai berikut Berhubung teknik kepemimpinan Camat dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif, maka Camat dapat mengikuti Diklat Kepemimpinan yaitu Diklat Kepemimpinan yang spesifik untuk pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.. Camat melibatkan swasta sebagai pihak ketiga dalam mewujudkan *Good Governance*, karena terdapat kombinasi antara peran pemerintah, masyarakat serta swasta. Camat dapat melibatkan PT. Unilever sebagai pemasok barang harian kemudian melibatkan PT. Dagang Penyalur (DP) maupun Bank BNI dan Bank Mandiri dengan memberikan bantuan dana, peralatan dan perlengkapan. Melibatkan berbagai SKPD yang terkait dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas, diantaranya:

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi:
 1. Memberikan sosialisasi mengenai sampah dan pengelolaannya
 2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan satu kali dalam sebulan, baik dilaksanakan di Kecamatan ABTB maupun di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi
 3. Memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan seperti becak betor untuk penampungan dan pengangkutan sampah bagi masing-masing kelurahan.
- b. Dinas Pertanian untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai mekanisme pembuatan kompos dari hasil pengolahan sampah organik serta penggunaannya secara baik dan benar. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan sekali dalam sebulan.
- c. Dinas Kesehatan untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai upaya yang dapat dilakukan agar barang olahan daur ulang sampah tetap steril serta memberikan pengetahuan bagaimana cara mencegah penyakit apabila menggunakan barang hasil daur ulang sampah.
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membantu bidang pemasaran dan membuka jaringan serta akses pangsa pasar, seperti Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Lereang, Pasar Banto dan Pasar Aur Kuning maupun di luar kota Bukittinggi dalam mendistribusikan barang hasil daur ulang sampah dari Kecamatan ABTB.
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membuka akses dalam mempromosikan dan memberikan informasi mengenai Program Pengelolaan



- Sampah Berbasis Komunitas dan hasil daur ulang sampah. Contohnya melalui website Kota Bukittinggi maupun website SKPD yang ada di Bukittinggi.
- f. Kantor Lingkungan Hidup dapat memberikan kontribusi dengan mengadakan sosialisasi maupun diklat mengenai lingkungan serta dampak apabila tidak menjaga lingkungan dengan baik. Diklat dapat dilaksanakan sekali dalam tiga bulan di Kecamatan ABTB maupun di Kantor Lingkungan Hidup.
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan dan Nagari dapat membantu Camat dalam meningkatkan motivasi dan minat masyarakat dengan mengadakan perlombaan kelurahan terbersih dan terkreatif dalam pembuatan kompos dan barang hasil daur ulang sampah

Selain itu, pemerintah daerah perlu Membentuk kelembagaan UPTD Pengolahan Sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan di kantor kecamatan ABTB. Dimaksudkan menghindari tumpang tindih antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Camat. Jadi pegawai UPTD Pengolahan Sampah dapat melaksanakan tugas yang berkenaan dengan hal yang bersifat teknis dan operasional. Sedangkan Camat akan semakin fokus dalam meningkatkan motivasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Karyadi, M. 1983. *Kepemimpinan (Leadership)*. Bandung: Karya Nusantara.
- Labolo, Muhadam. 2012. *Kepemimpinan Bahari*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Robbins, Stephen P. 1988. *Essentials of Organization Behaviour*. New Jersey: Prentice Hall.
- Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint.
- Roesmidi, dkk (Tim Pengajar Subjek). 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatinangor.
- Supriatna, Tjahya. 2010. *Manajemen, Kepemimpinan dan Sumber Daya Aparatur*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Thoha, Miftah. 2007. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Grafindo Persada.

Peraturan Perundang – Undang

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Beserta penjelasannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Evidensi Ilmiah

- Soehadjono. 1981. *Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Singkat tentang Pemimpin dan Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya*. Malang: APDN Malang Jawa Timur

Sumber – Sumber Lain

- Infrastuktur Indonasi. 2003. Jakarta: Bappenas.

